



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 8 TAHUN 2006**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DESA MOYO MEKAR DI KECAMATAN MOYO HILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan perkembangan Desa Moyo serta aspirasi masyarakat, dipandang perlu meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna menjamin kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi desa, potensi desa, faktor sosial, budaya, politik, jumlah penduduk dan luas wilayah desa, dipandang perlu membentuk Desa Moyo Mekar sebagai pemekaran dari Desa Moyo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Moyo Mekar di Kecamatan Moyo Hilir.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1665);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan dan Penghapusan Desa

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2001 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 326).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

dan

BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG
PEMBENTUKAN DESA MOYO MEKAR DI KECAMATAN MOYO
HILIR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN, NAMA DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Moyo Mekar sebagai pemekaran dari Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir.

Pasal 3

Desa Moyo Mekar berasal dari sebagian wilayah Desa Moyo yang terdiri atas :

- a. Dusun Moyo Atas;
- b. Dusun Moyo Bawah;
- c. Dusun Satowe Brang;

Pasal 4

Dengan terbentuknya Desa Moyo Mekar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Moyo dikurangi dengan dusun-dusun dalam wilayah Desa Moyo Mekar sebagaimana dimaksud Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Luas wilayah Desa Moyo Mekar Kecamatan Moyo Hilir adalah 70,00 KM² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Berare;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kakiang;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Serading;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Moyo .
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

- (3) Penentuan Batas Wilayah Desa Moyo Mekar secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 6

Kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa ;
- c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten;
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Persiapan Moyo Mekar ditetapkan sebagai Badan Permusyawaratan Desa Desa Moyo Mekar dan tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya masa jabatannya.

Pasal 8

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa Moyo Mekar, paling lambat 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini, harus sudah ditetapkan Kepala Desa terpilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini Pejabat Sementara Kepala Desa Desa Persiapan Moyo Mekar tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya Kepala Desa terpilih.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1740.f Tahun 2003 tentang Pembentukan Desa Moyo Mekar sebagai Desa Persiapan di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal, 27 Desember 2006

BUPATI SUMBAWA,

ttd

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal, 27 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA,**

ttd

A. KAHAR KARIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2006 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 8 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA MOYO MEKAR DI KECAMATAN MOYO HILIR

I. UMUM

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten, sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan dapat mempercepat timbulnya prakarsa dan kreatifitas masyarakat serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia.

Dengan telah ditingkatkannya status desa persiapan menjadi desa difinitif maka diharapkan dapat segera terwujudnya Desa yang mandiri sesuai dengan semangat Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga pelayanan kepada masyarakat yang prima dapat segera terwujud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

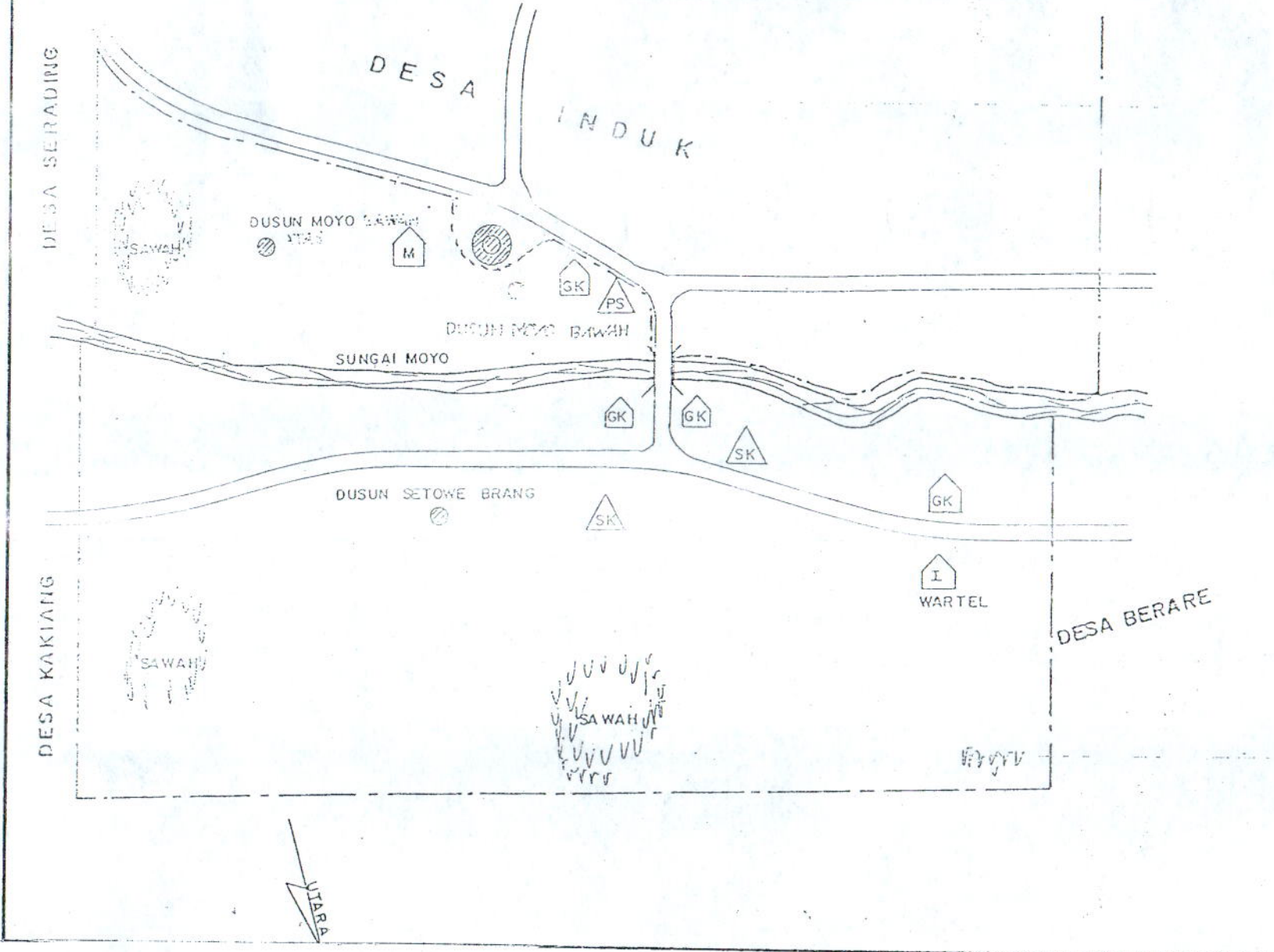
Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 486

PETA DESA MOYO MEKAR KECAMATAN MOYO HILIR



KETERANGAN

	JALAN KABUPATEN
	SUNGAI
	BATAS DESA
	KANTOR CAMAT
	KANTOR POLISI
	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
	GEDUNG KANTOR
	MESJID
	INDUSTRI
	SEKOLAH
	PUSAT PEMERINTAHAN DESA
	DUSUN
	MAKAM / KUBURAN